

Pengelolaan Sampah di Kota Sukabumi : Analisis *Dynamic Governance*

Sintia Maulida^{1*}; Andi Mulyadi²; Yana Fajar Basori³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*Correspondence : sintiamaulida@ummi.ac.id

Date of submission: 28 June 2026 | Date of acceptance: 31 July 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *dynamic governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori *dynamic governance* oleh Neo & Chen (2007) dengan tiga dimensi, yaitu *culture*, *capabilities*, dan *change*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dynamic governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi belum berjalan optimal karena kemampuan pemerintah pada dimensi *culture* dan dimensi *capabilities* masih dalam tahap perencanaan dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik pengelolaan sampah. Sehingga dimensi *change* belum menghasilkan perubahan dan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi dinamika permasalahan persampahan. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan dan pengembangan inovasi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci

Dynamic governance, Pengelolaan sampah, Kebijakan, Kota Sukabumi.

ABSTRACT

This study aims to analyze dynamic governance in waste management in the city of Sukabumi using the dynamic governance theory proposed by Neo & Chen (2007), which comprises three dimensions: culture, capabilities, and change. This study employs a qualitative research method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation, as well as data analysis using the Miles and Huberman (1992) model through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that dynamic governance in waste management in Sukabumi City has not yet functioned optimally because the government's capabilities in the dimensions of culture and capabilities are still in the planning stage and have not been fully realized in waste management practices. Consequently, the dimension of change has not yet produced adaptive changes and policies to address the dynamic challenges of waste management. These findings highlight the need to strengthen policies and develop innovations to achieve more effective, adaptive, and sustainable waste management.

Keywords

Dynamic governance, waste management, policy, Sukabumi City

Pendahuluan

Perkembangan kota terjadi seiring dengan kemajuan teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan sosial yang menjadikan kota sebagai pusat kegiatan seperti pariwisata, perdagangan, pendidikan, industri, dan pemerintahan. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan permasalahan, yaitu masalah sampah (Harahap et al., 2024). Dalam Undang-undang No 18 tahun 2008 Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya berbagai aktivitas manusia, volume sampah yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Tingginya produksi dan konsumsi di perkotaan menandakan bahwa kegiatan perekonomian cukup tinggi (Prihatin, 2020).

Pertumbuhan populasi yang begitu cepat menyebabkan volume sampah yang dihasilkan semakin meningkat setiap tahunnya (Permatasari, 2024). Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Sukabumi yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Berdasarkan Open Data Kota Sukabumi, Jumlah penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2024 mencapai 370.096 jiwa dan meningkat menjadi 377.987 jiwa pada tahun 2025. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan (Islamiati, 2024). Sampah telah menjadi masalah serius dalam kehidupan masyarakat, terutama masalah lingkungan (Maesarini, 2023). Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk peraturan (Prinardi et al., 2023). Pemerintah Kota Sukabumi membentuk kebijakan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga (Sukmaniar et al., 2023). Yang dijalankan melalui Program Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) dan Program Bank Sampah. TPS 3R sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah karena membantu mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan kualitas sampah yang akan diolah di tempat pembuangan akhir (Halimah et al., 2025). Sedangkan bank sampah merupakan solusi efektif dalam pengelolaan sampah untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang sampah, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi (Wiralestari et al., 2024). Meskipun regulasi telah diterapkan, implementasinya belum berjalan optimal (Marlina, 2025). Implementasi kedua program pengelolaan sampah di Kota Sukabumi belum efektif dalam mengurangi timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul. Di Kota Sukabumi, pemilahan sampah dari rumah tangga belum memberikan hasil yang baik pada kondisi timbulan sampah di TPA Cikundul (Puspita et al., 2023).

Kondisi tersebut juga diungkapkan dalam berita Antara (2024) yang menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi mengandalkan TPS3R dan bank sampah untuk mengurangi beban sampah di TPA Cikundul. Akan tetapi, kedua program tersebut belum berjalan secara efektif karena timbulan sampah yang masuk ke TPA mencapai 180 ton per hari. Akibatnya, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan timbulan sampah di TPA Cikundul melebihi kapasitas penyimpanan.

Kenaikan timbulan tersebut dapat dilihat pada tabel jumlah timbulan sampah di Kota Sukabumi yang ada dibawah:

Tabel 1. Jumlah Volume Timbulan Sampah Kota Sukabumi

No	Tahun	Ton/Tahun
1	2021	65.795.65
2	2022	65.828.41
3	2023	67.308.30
4	2024	68.081.44
5	2025	69.496.13

Sumber : Open Data Kota Sukabumi, 2025

Berdasarkan tabel 1 di atas, timbulan sampah di Kota Sukabumi dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, timbulan sampah tercatat sebesar 65.795,65 ton, kemudian pada tahun 2025 meningkat menjadi 69.496,13 ton. Peningkatan volume sampah yang terjadi belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas TPA yang tersedia (Putra et al., 2025). Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) tahun 2025, TPA Cikundul memiliki luas lahan sekitar 10,56 hektar dengan kapasitas desain sebesar 1.219.400 m³. Namun, pada tahun 2024 volume sampah yang tertampung mencapai 1.967.408 m³. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Cikundul telah melampaui kapasitasnya, sehingga apabila tidak segera ditangani, dapat menimbulkan permasalahan lain, seperti pencemaran lingkungan, timbulnya penyakit, dan tanah longsor (Pratiwi, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum mampu mengatasi peningkatan timbulan sampah secara efektif serta belum terdapat inovasi dalam pengelolaan sampah karena masih didominasi oleh program TPS3R dan bank sampah. Dalam pengelolaan sampah, inovasi sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan sampah (Sucahyo & Fanida, 2021). Selain itu, kemampuan pemerintah dalam merespons dinamika lingkungan juga sangat penting (Amas & Fauzan, 2025).

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah sampah di Kota Sukabumi, diperlukan perubahan dalam pengelolaan sampah. Dalam perspektif administrasi publik, tata kelola pemerintahan modern memerlukan pendekatan yang dinamis agar institusi pemerintahan mampu merespons berbagai perubahan melalui adaptasi kebijakan yang relevan dan inovatif (Wandira et al., 2024). Sehingga

tercipta pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan. Salah satu pendekatan tata kelola modern yang relevan, yaitu *dynamic governance*. Perkembangan zaman yang berlangsung sangat cepat menuntut pemerintah untuk bertindak secara dinamis agar memiliki kualitas tata kelola yang baik (Alim, 2022). Menurut Neo & Chen (2007), *dynamic governance* merupakan kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan program yang ada dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Konsep dasar dari *dynamic governance* yaitu menggabungkan *culture* dengan *capabilities*, sehingga menghasilkan perubahan (Putri & Mawar, 2025). Terwujudnya *dynamic governance* terletak pada kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi perubahan lingkungan serta menyesuaikan kelembagaan secara adaptif agar penyelenggaraan pemerintahan tetap efektif dan responsif terhadap dinamika yang berkembang. Oleh karena itu, *dynamic governance* dapat terwujud apabila dijalankan melalui kebijakan adaptif (Muttaqin, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan *Dynamic Governance* pada berbagai sektor pemerintahan. Kamil et al. (2021) mengkaji *dynamic governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Malang dengan menitikberatkan pada model *agile governance* dan pendekatan *citizen-centric*. Sari dan Rusli (2022) menganalisis penerapan *Dynamic Governance* dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Yanuar et al. (2023) mengkaji *Dynamic Governance* dalam tata kelola permukiman akibat urbanisasi di Kota Depok, sedangkan Ascarya dan Harmawan (2025) meneliti *Dynamic Governance* dalam penyelenggaraan Nganjuk Smart City.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji penerapan *Dynamic Governance* di berbagai sektor. Namun, sebagian besar masih berfokus pada penerapan masing-masing dimensi dari *Dynamic Governance*. Sementara itu, kajian yang menganalisis keterkaitan antardimensi *Dynamic Governance*, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah, masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* konseptual mengenai bagaimana interaksi antara dimensi *culture*, *capabilities*, dan *change* dalam menghasilkan kebijakan adaptif.

Sehingga, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis keterkaitan antara dimensi *culture*, *capabilities*, dan *change* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan setiap dimensi *Dynamic Governance*, tetapi juga menjelaskan bagaimana interaksi antardimensi tersebut menghasilkan kebijakan pengelolaan sampah yang adaptif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Dynamic Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi melalui dimensi *culture*, *capabilities*, dan *change*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep *Dynamic Governance*, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah, sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sampah agar adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika lingkungan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam tentang *dynamic governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi. Menurut Sugiyono (2023) Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana peneliti menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena orang tersebut dianggap yang paling tahu (Sugiyono, 2023). Informan terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sukabumi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, serta masyarakat yang mengikuti program pengelolaan sampah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Sukabumi dan DLH Kota Sukabumi terkait pengelolaan sampah, interaksi antarperangkat daerah maupun masyarakat, serta pelaksanaan pengelolaan sampah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang terdiri dari lima indikator teori *dynamic governance* oleh Neo & Chen (2007), yaitu *long term*, *thinking ahead*, *thinking again*, *thinking across*, dan *change*. Dokumentasi yang digunakan, seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi, Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, dilakukan proses pengelompokan atau penyaringan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan indikator yang digunakan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun secara sistematis, lalu dilanjutkan dengan penulisan ke dalam bentuk narasi. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi pada data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan, sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.

Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan untuk menghasilkan hasil yang valid.

Sedangkan triangulasi teknik, dilakukan dengan memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang didapat dari hasil observasi dan dokumentasi pada informan yang sama.

Hasil dan Pembahasan

Dynamic governance merupakan kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program publiknya dengan perubahan lingkungan, serta mengubah cara kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan, sehingga kepentingan jangka panjang dapat tercapai. Perencanaan dan implementasi harus adaptif dengan kondisi perubahan lingkungan yang terjadi, sehingga terciptanya pemerintah yang cepat, responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi (Neo & Chen, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *dynamic governance* dengan dimensi *culture (long-term)*, *Capabilities (thinking ahead, thinking again, dan thinking across)*, dan *change* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

1. Culture

a. Long Term

Menurut Neo dan Chen (2007), *long term* merupakan tindakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat orientasi jangka panjang, sebagai arah pembangunan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti yang disampaikan oleh seorang informan:

"Kita punya dokumen perencanaan yang berskala kota yang sifatnya jangka panjang, namanya RPJPD untuk 20 tahun, Untuk 5 tahunnya, kita ada RPJMD. Setelah RPJMD selesai, kita bersama dinas terkait menyusun Renstra dinas. Ketika tiga dokumen itu sudah inline, nanti dalam penyusunan perjalanan tahunan itu akan bisa dipastikan bahwa program kegiatan yang dijalankan oleh dinas itu akan mendukung pencapaian RPJMD maupun Rencana Strategis dinas itu sendiri".

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki agenda pembangunan jangka panjang yang direncanakan secara sistematis terkait pengelolaan sampah. Sedangkan informan lain menyampaikan bahwa :

"DLH Kota Sukabumi merencanakan pengolahan sampah jangka panjang, melalui upaya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta memperkuat program pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan dan daur ulang".

Temuan tersebut menunjukkan bahwa, pemerintah melakukan upaya melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penguatan program pemilahan dan daur ulang sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi timbunan sampah dan membangun budaya pengelolaan sampah di masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat orientasi jangka panjang yang tercermin dalam penyusunan dokumen perencanaan secara sistematis, upaya peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan program pengelolaan sampah ke arah yang berkelanjutan. Apabila dikaitkan dengan teori *dynamic governance*,

kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun budaya organisasi yang berorientasi pada jangka panjang. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi indikator *long term* di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pemilahan sampah dari sumber, program TPS3R dan bank sampah belum efektif dalam mengurangi timbunan sampah, serta belum terdapat pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi jangka panjang yang telah dirumuskan, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Akibatnya, berbagai upaya yang dilakukan masih belum memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yanuar et al. (2023) yang menunjukkan bahwa orientasi jangka panjang diwujudkan melalui dokumen perencanaan, seperti RTRW yang diturunkan dari RPJMD, serta program yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan dalam jangka panjang. Persamaannya, kedua penelitian menegaskan pentingnya perencanaan yang berkesinambungan sebagai dasar penyelesaian masalah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Kota Sukabumi telah memiliki perencanaan jangka panjang, implementasinya belum berjalan optimal karena masih terbatasnya inovasi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan Ascarya dan Harmawan (2025) yang menemukan bahwa budaya organisasi dalam penyelenggaraan Nganjuk Smart City telah ditunjukkan melalui berbagai inovasi pelayanan, kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah, dan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat. Pada pengelolaan sampah di Kota Sukabumi, budaya yang berorientasi jangka panjang belum sepenuhnya menghasilkan inovasi maupun perubahan yang signifikan dalam implementasi, sehingga efektivitas pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, *long term* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi telah tercermin melalui orientasi jangka panjang melalui dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan pengelolaan sampah yang berorientasi pada keberlanjutan. Namun, implementasi dari berbagai tindakan tersebut masih belum berjalan secara optimal.

2. Capabilities

a. Thinking Ahead

Menurut Neo dan Chen (2007), *thinking ahead* merupakan kemampuan pemerintah untuk mengantisipasi perubahan dan tantangan di masa depan dengan penyusunan strategi sebelum tantangan tersebut terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat langkah antisipasi terhadap tantangan yang terjadi ke depan melalui penyusunan strategi dan pengembangan program, seperti yang disampaikan oleh seorang informan:

"Pengelolaan sampah, kalau dari sekarang kita tidak melakukan lompatan yang signifikan, kita akan menemui masalah ke depannya. Makanya kami menginisiasi yang namanya waste-to-energy melalui Refuse Derived Fuel (RDF). Selain itu, kami juga merencanakan untuk mengembangkan bank sampah dengan menambahkan bank sampah organik".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan di masa depan, tidak lagi hanya berorientasi pada pengurangan timbulan sampah, tetapi mulai mengarah pada pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Berbeda dengan informan sebelumnya, informan lain memiliki strategi yang berbeda untuk menghadapi tantangan di masa mendatang:

"Kami melakukan berbagai upaya agar kebijakan atau program pengolahan persampahan di Kota Sukabumi ini dapat berjalan efektif atau berkelanjutan ke depannya, salah satunya melalui penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Lalu, kami juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan membentuk tim SABER (Sapu Bersih)".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah mulai berfokus pada pengelolaan yang menitikberatkan pada pengurangan sampah dari sumbernya. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah.

Sedangkan informan masyarakat menyampaikan bahwa:

"Katanya akan ada pengembangan program pengelolaan sampah dengan adanya maggot, bank kompos, dan mesin cacah, namun sampai saat ini belum tersedia".

Temuan tersebut menunjukkan adanya pengembangan program pengelolaan sampah yang dapat memperluas fungsi program pengelolaan sampah, tidak lagi berorientasi pada pengumpulan sampah. Namun, pengembangan tersebut masih dalam rencana dan belum dijalankan.

Temuan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mempersiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi tantangan yang terjadi di masa mendatang. Apabila dikaitkan dengan teori *dynamic governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kesadaran terhadap perubahan lingkungan yang akan dihadapi dan mulai mempersiapkan langkah antisipatif. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi *thinking ahead* belum berjalan optimal. Pengelolaan sampah masih didominasi oleh program TPS3R dan bank sampah, sementara pemanfaatan teknologi, dan pengembangan program pengelolaan sampah yang telah direncanakan belum terealisasi secara optimal. Selain itu, pemilahan sampah dari sumber masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah masih pada tahap perencanaan, belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik pengelolaan sampah. Dalam *dynamic governance*, *thinking ahead* tidak berhenti pada kemampuan memprediksi masa depan, tetapi juga harus diwujudkan dengan tindakan nyata di lapangan.

Sari dan Rusli (2022) menemukan bahwa *thinking ahead* diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai strategi menghadapi permasalahan di masa depan. Persamaannya terletak pada adanya perencanaan dan

strategi jangka panjang untuk menjawab tantangan yang akan datang. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang telah disusun di Kota Sukabumi belum sepenuhnya diwujudkan dalam implementasi pengelolaan sampah.

Ascarya dan Harmawan (2025) menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerapkan *thinking ahead* melalui pengembangan layanan dan inovasi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Perbedaannya, inovasi pada Nganjuk Smart City telah diwujudkan dalam berbagai layanan digital yang berjalan, sedangkan di Kota Sukabumi sebagian besar inovasi pengelolaan sampah masih berada pada tahap perencanaan sehingga belum memberikan dampak yang optimal terhadap penyelesaian permasalahan persampahan.

Dengan demikian, *thinking ahead* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi telah tercermin melalui penyusunan strategi, inovasi, dan rencana pengembangan program. Namun, implementasinya belum optimal karena strategi yang disusun masih dalam tahap perencanaan dan belum diwujudkan secara nyata dalam praktik pengelolaan sampah.

b. Thinking Again

Menurut Neo dan Chen (2007), *thinking again* merupakan kemampuan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan maupun program yang sedang dijalankan agar lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan evaluasi pengelolaan sampah, seperti yang dinyatakan oleh informan:

"Tiap 3 bulan kita lakukan evaluasi dengan melihat perkembangan target realisasi, agar nantinya dapat diketahui jika ada kendala".

Temuan tersebut menunjukkan bahwa, evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan kebijakan maupun program agar tetap berjalan optimal dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan.

Selain dilakukan evaluasi, terdapat perbaikan pada pengelolaan sampah seperti yang disampaikan oleh seorang informan: *"Untuk sekarang kita sedang melakukan revisi Peraturan Daerah pengelolaan sampah, agar Perda tersebut lebih tajam dengan menambahkan sanksi di dalamnya"*. Sedangkan informan yang lain menyampaikan bahwa: *"Perbaikan-perbaikan ada, misalnya kita pada tahun ini menghilangkan TPS yang ada di Kota Sukabumi"*. Dari kedua pernyataan tersebut, temuan ini menunjukkan bahwa selain melakukan evaluasi, terdapat perbaikan terhadap kebijakan dan sistem pengelolaan sampah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah.

Selanjutnya, informan masyarakat menyampaikan bahwa: *"Ada, misalnya dari pelaksanaan programnya atau pergantian pengelola yang kerjanya belum optimal"*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melakukan evaluasi pada program pengelolaan sampah, agar program pengelolaan sampah di masyarakat dapat berjalan optimal.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap kebijakan, program, dan sistem pengelolaan sampah sebagai

upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah. Apabila dikaitkan dengan teori *dynamic governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan pembelajaran dari pelaksanaan kebijakan dan program yang telah diterapkan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan, sehingga kebijakan dan program yang dijalankan tetap relevan dengan dinamika lingkungan.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi indikator *thinking again* di lapangan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang optimal. Kondisi tersebut tercermin dari volume timbunan sampah yang terus meningkat, sehingga menyebabkan TPA Cikundul mengalami kelebihan kapasitas (*overload*). Hal ini mengindikasikan bahwa proses evaluasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan perbaikan yang berdampak signifikan terhadap permasalahan sampah. Perbaikan yang dilakukan masih berfokus pada aspek administratif, regulasi, dan perencanaan, sedangkan implementasinya di lapangan belum menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah.

Penelitian Putri dan Mawar (2025) menyimpulkan bahwa *thinking again* belum diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan karena belum menghasilkan solusi untuk meningkatkan ruang terbuka hijau. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan proses *thinking again* melalui evaluasi rutin dan berbagai upaya perbaikan, meskipun hasilnya belum optimal.

Di sisi lain, hasil penelitian Ascarya dan Harmawan (2025) menemukan bahwa praktik *thinking again* telah dilakukan, tetapi evaluasi masih belum sistematis sehingga belum mampu menghasilkan perbaikan yang optimal. Persamaannya terletak pada adanya mekanisme evaluasi yang telah berjalan, namun belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, *thinking again* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap kebijakan, program dan sistem pengelolaan sampah. Namun, implementasi hasil evaluasi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak nyata dalam menyelesaikan permasalahan persampahan, sehingga efektivitas pengelolaan sampah di Kota Sukabumi masih belum optimal.

c. Thinking Across

Menurut Neo dan Chen (2007), *thinking across* merupakan kemampuan pemerintah untuk belajar dari pengalaman pihak lain, kemudian mengadaptasi dan menerapkannya sesuai dengan karakteristik daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah telah melakukan pembelajaran dengan daerah lain terkait praktik pengelolaan sampah. Seorang informan menyampaikan bahwa: "*Kemarin kita studi banding ke Banyumas sama DLH untuk melihat bagaimana pengolahan sampah RDF itu dilakukan oleh masyarakat langsung*". Sedangkan informan lain melakukan studi

banding dengan praktik yang berbeda dari informan sebelumnya: “Kalau studi banding, kita pernah lakukan di beberapa tempat, seperti di Banyumas, Karawang, dan Purwokerto. Di sana, pengolahan sampah dibuat menjadi paving block. Dari daur ulang sampah inilah yang jadi pembandingan buat kita studi”. Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan pembelajaran lintas daerah terkait praktik pengelolaan sampah, sehingga tidak hanya bergantung pada pengalaman internal daerah.

Selain itu, masyarakat juga ikut dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti yang diungkapkan oleh informan: “Ya, kalau ada kegiatan sosialisasi dan edukasi, kita selalu dilibatkan”. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan sampah di Kota Sukabumi tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan pembelajaran dengan daerah lain melalui studi banding serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Apabila dikaitkan dengan teori *dynamic governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melakukan pembelajaran lintas sektor untuk memperoleh pengetahuan baru. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi *thinking across* belum berjalan secara optimal. Hasil pembelajaran dari daerah lain belum diimplementasikan secara optimal dalam praktik pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Sukabumi. Hingga saat ini, pengelolaan sampah masih didominasi oleh program TPS3R dan bank sampah, sementara kedua program tersebut belum mampu mengurangi timbulan sampah secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang diperoleh dari daerah lain belum menghasilkan praktik baru maupun perubahan nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi.

Penelitian Yanuar et al., (2023) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok menerapkan *thinking across* melalui konsultasi dengan pemerintah pusat, studi banding, kajian bersama, dan survei masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Persamaannya terletak pada adanya pembelajaran dari pihak lain untuk memperkuat tata kelola. Namun, sebagaimana di Kota Sukabumi, tidak seluruh hasil pembelajaran tersebut dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan daerah.

Penelitian Ascarya dan Harmawan (2025) menemukan bahwa *thinking across* diwujudkan melalui studi banding dan adopsi praktik dari daerah lain, tetapi implementasinya masih terbatas karena dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan kesesuaian dengan kondisi lokal. Begitu pula di Kota Sukabumi, pembelajaran lintas daerah telah dilakukan, namun belum sepenuhnya menghasilkan praktik yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

Dengan demikian, *thinking across* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan pembelajaran dengan daerah lain terkait praktik pengelolaan sampah melalui kegiatan studi banding. Namun, hasil pembelajaran tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam praktik pengelolaan sampah.

3. Change

Menurut Neo dan Chen (2007), dimensi change terjadi ketika dua dimensi utama dari *dynamic governance*, yaitu culture dan capabilities, saling berinteraksi sehingga menghasilkan perubahan. Dari perubahan tersebut, kemudian dihasilkan kebijakan yang adaptif untuk menghadapi perubahan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi *change* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi belum menghasilkan perubahan maupun kebijakan yang adaptif. Meskipun pemerintah telah memiliki orientasi jangka panjang, mengantisipasi tantangan di masa depan melalui penyusunan strategi dan pengembangan program pengelolaan sampah, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan, program dan sistem pengelolaan sampah, serta mempelajari praktik pengelolaan sampah dari daerah lain. Namun, hasilnya masih belum optimal karena tindakan yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sampah di Kota Sukabumi. Kondisi ini tercermin dari masih rendahnya tingkat pemilahan sampah dari sumber, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah yang masih didominasi oleh program TPS3R dan bank sampah tanpa diikuti inovasi, volume timbulan sampah yang terus meningkat, TPA Cikundul yang mengalami overload, serta belum diterapkannya hasil pembelajaran dari daerah lain ke dalam praktik pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik Kota Sukabumi.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan informan yang menyampaikan bahwa: "*Kalau perubahan di lingkungan masyarakat, saya melihat belum ada. Dari dulu sampai sekarang masih seperti itu. Masalah sampah masih terjadi. Walaupun sosialisasi, bimbingan teknis dan sebagainya sudah sering dilakukan. Tapi nyatanya masih seperti itu*". Pernyataan ini menunjukkan bahwa, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum menghasilkan perubahan atau dampak nyata pada pengelolaan sampah.

Lalu informan lain menyampaikan bahwa: "*Untuk pengelolaan sampah ini masih sama seperti dulu, belum ada perubahan*". Pernyataan ini menunjukkan bahwa, pengelolaan sampah yang berjalan masih sama dengan sebelumnya, belum terdapat perubahan. Begitu juga dengan informan masyarakat yang menyampaikan bahwa: "*Tidak ada perubahan, masih sama dengan yang sebelumnya*". Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dirasakan di lingkungan masyarakat masih sama, belum terdapat perubahan.

Apabila dikaitkan dengan teori *dynamic governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara dimensi *culture* dan *capabilities* belum

menghasilkan perubahan maupun kebijakan yang adaptif dalam pengelolaan sampah karena berbagai upaya yang telah dilakukan dalam dimensi *culture* dan dimensi *capabilities*, belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi. Akibatnya, perubahan yang diharapkan belum mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan maupun memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian permasalahan persampahan di Kota Sukabumi.

Penelitian Yanuar et al., (2023) menunjukkan bahwa penerapan *dynamic governance* menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan adaptif untuk menghadapi permasalahan urbanisasi di Kota Depok. Sedangkan penelitian ini, belum menghasilkan perubahan yang signifikan dalam menghadapi permasalahan sampah. Sebaliknya, penelitian Ascarya & Harmawan (2025), dimensi *change* telah mulai diterapkan, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, dimensi *change* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi belum menghasilkan perubahan dan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa *dynamic governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi belum berjalan secara optimal. Pada dimensi *culture*, pemerintah telah memiliki orientasi jangka panjang melalui dokumen perencanaan dan pengembangan program pengelolaan sampah berkelanjutan. Pada dimensi *capabilities*, pemerintah telah menunjukkan kemampuan *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* melalui penyusunan strategi, pengembangan program pengelolaan sampah, evaluasi kebijakan, serta pembelajaran dari daerah lain. Namun, sebagian besar upaya tersebut masih berada pada tahap perencanaan, belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi. Akibatnya, dimensi *change* dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi belum menghasilkan perubahan maupun kebijakan yang adaptif.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep *Dynamic Governance* oleh Neo dan Chen (2007) bahwa keberhasilan dimensi *change* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dimensi *culture* dan dimensi *capabilities*, tetapi juga didukung oleh kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan seluruh tindakan tersebut secara nyata dan konsisten, sehingga perubahan dan kebijakan yang adaptif dapat terwujud. Dari sisi praktis, hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi melalui percepatan realisasi inovasi yang telah direncanakan, optimalisasi pemilahan sampah dari sumber, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan informan karena hanya melibatkan BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat,

sehingga belum mencakup perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan yang lebih beragam, seperti Wali Kota Sukabumi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, sektor swasta, komunitas lingkungan, dan akademisi. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat difokuskan pada salah satu dimensi *dynamic governance* agar menghasilkan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapannya.

Referensi

- Antara (2024). *DLH Sukabumi andalkan TP3SR kurangi beban sampah di TPA Cikundul*.
- Alim, B. N. (2022). Upaya mewujudkan dynamic governance pada pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 343-361. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14645>
- Amas, M. H. R. M., & Fauzan. (2025). Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Dalam Menangani Masalah Sampah Di Kota Raha: Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Dalam Menangani Masalah Sampah Di Kota Raha. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 4(2), 146–152.
- Ascarya, P. G., & Harmawan, B. N. (2025). Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Nganjuk Smart City oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(4), 706–724. <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5821>
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi (2025). *DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) KOTA SUKABUMI 2025*. Open Data Kota Sukabumi.
- Halimah, N. N., Nur, T., Sampurna, R. H. (2025). The Effect Of Waste Management Policy Implementation On The Effectiveness Of Waste Reduction Through 3r Tps In Sukabumi City. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 23(01), 336-352.
- Harahap, M. A. K., Harmain, U., Saragih, J. R., Sinurat, A., Sihombing, B., Purba, I. R., & Saragih, H. (2024). Perencanaan Sistem Cluster Pengelolaan Sampah Dalam Mengurangi Penumpukan Sampah Di Kota Pematang Siantar. *Jurnal Regional Planning*, 6(2), 69-76.
- Islamiati, D. (2024). Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 748-760. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v6i2.20900>
- Kamil, M., Roziqin, A., & Rahmawati, Y. (2021). Dynamic Governance Model Within Integrated Waste Management In Malang City: Agile People And Process In Actions. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 12(3), 312–330.
- Maesarini, I. W. (2023). Dynamics of local government policy in waste management in Indonesia. *Iapa Proceedings Conference*. 287-294. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2023.896>

- Marlina, S. (2025). Analisis kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 1-8.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Universitas Indonesia Press.
- Muttaqin, M. A. (2022). Membangun Kebijakan Adaptif Menuju Dynamic Governance. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 25(1), 4-6. <https://doi.org/10.31845/jwk.v25i1.773>
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities And Change In Singapore (English Version)*. World Scientific Publishing Company.
- Open Data Kota Sukabumi (2025). Jumlah Penduduk Kota Sukabumi.
- Open Data Kota Sukabumi (2025). Jumlah Volume Timbulan Sampah Di Kota Sukabumi.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
- Permatasari, C. (2024). A Transforming Waste Management Through Adaptive And Sustainable Public Policy In Surakarta City. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 14(02), 198-219.
- Pratiwi, S. H. (2021). Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Agen Biokonversi Black Soldier Fly untuk Mengatasi Limbah Rumah Tangga. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia (JAPI)*, 6(1), 53-60.
- Prihatin, R. B. (2020). Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 1-16.
- Prinardi, G., Purwanti, D., & Basori, Y. F. F. (2023). Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 152-166.
- Putra, R. M. L., Basori, Y. F. F., & Amirulloh, M. R. (2025). The Effectiveness Of The Reduce, Reuse, Recycle (Tps3r) Waste Management Program In Waste Reduction Efforts By The Environmental Agency (Dlh) Of Sukabumi City. *ICEBA*, 1(1), 1-13.
- Putri, D. Y., & Mawar, M. (2025). Penerapan Dynamic Governance dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2), 01-09.
- Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). Pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1-11.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Sari, A. I., & Rusli, Z. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 22-32. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i1.442>

- Sucahyo, F. M., & Fanida, E. H. (2021). Inovasi Pengelolaan Sampah Menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya (Studi Kasus di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Surabaya). *Publika*, 9(2), 39-52.
- Sukmaniar, Saputra, W., Hermansyah, M. H., & Anggraini, P. (2023). Bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah di perkotaan. *Environmental Science Journal (Esjo): Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1(2), 61-67.
- Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Wandira, R. S., Susanti, G., & Hans, A. (2024). Paradigma Baru Pengelolaan Sampah: Peran Budaya Organisasi dan Kapabilitas Dinamis dalam Program Bank Sampah. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(2), 347-360.
- Wiralestari, W., Arum, E. D. P., Wijaya, R., & Friyani, R. (2024). Pemanfaatan Akuntansiku Sebagai Alat Pengelolaan Keuangan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Digital Pada Usaha Kedai Kopi Di Kota Jambi. *Abdimas Galuh*, 6(1), 1-8. <http://dx.doi.org/10.25157/ag.v6i1.12175>
- Yanuar, F., Kartini, D. S., & Akbar, I. (2023). Penerapan Dynamic Governance terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 202–212. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3174>